

2024



PENGADILAN NEGERI
SIBOLGA

LAPORAN KEUANGAN

099203

PERIODE 1 JANUARI 2024 – 30 JUNI 2024



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinya.

Kantor Pengadilan Negeri Sibolga adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sibolga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis aktual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Sibolga. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sibolga, 29 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran

Esron Ginting, SH
NIP. 197001251993031007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	8
V. Catatan atas Laporan Keuangan	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
F. Pengungkapan Penting Lainnya	45
VI. Lampiran dan Daftar	47



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Jl. Padangsidempuan No. 6 Sarudik Kecamatan Sarudik
Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara 22611.
www.pn-sibolga.go.id, pnsibolga@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sibolga yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Periode 1 Januari 2024 – 30 Juni 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sibolga, 29 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



Esron Ginting, SH
NIP. 197001251993031007

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sibolga Periode 1 Januari 2014 – 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 25.642.000,- atau mencapai 67 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 38.426.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada periode periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 73.133.000,- atau mencapai 35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 206.180.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset pada 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 236.967.333,- Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0,- dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 236.967.333,- dan Rp. 0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 1 Januari - 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 25.642.000,-

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 77.951.952,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 52.309.952,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (Rp. 52.309.952,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp. 52.309.952,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 52.309.952,- sehingga Ekuitas akhir pada 30 Juni 2024 adalah senilai Rp. 0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk 1 Januari – 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 Juni 2024

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
I. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	38.426.000.	25.642.000.	(12.784.000.)	67	37.240.000.	25.299.500.	11.940.500.	68.
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
3. Pendapatan BLU	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	38.426.000.	25.642.000.	(12.784.000.)	67	37.240.000.	25.299.500.	11.940.500.	68.
II. Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II)	38.426.000.	25.642.000.	(12.784.000.)	67	37.240.000.	25.299.500.	11.940.500.	68.
B. Belanja Negara	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	206.180.000.	73.133.000.	(133.047.000.)	35	154.300.000.	73.822.500.	80.477.500.	48.
1. Belanja Pegawai	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0
2. Belanja Barang	206.180.000.	73.133.000.	(133.047.000.)	35	154.300.000.	73.822.500.	80.477.500.	48.
Jumlah Belanja Negara	206.180.000.	73.133.000.	(133.047.000.)	35	154.300.000.	73.822.500.	80.477.500.	48.
C. PEMBIAYAAN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
NERACA
PER TAHUN 30 Juni 2024

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.000.000,	0	10.000.000	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	226.967.333,	0	226.967.333	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	236.967.333,	0	236.967.333	-
JUMLAH ASET	236.967.333,	0	236.967.333	-
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	226.967.333,	0	226.967.333	0,00
Uang Muka dari KPPN	10.000.000,	0	10.000.000	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	236.967.333,	0	236.967.333	-
JUMLAH KEWAJIBAN	236.967.333,	0	236.967.333	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	236.967.333	0	236.967.333	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2024

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0,	0,	0,	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0,	0,	0,	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	25.642.000,	25.299.500,	342.500,	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	25.642.000,	25.299.500,	342.500,	
PENDAPATAN HIBAH	0,	0,	0,	
Jumlah Pendapatan	25.642.000,	25.299.500,	342.500,	1,354
BEBAN OPERASIONAL	0,	0,	0,	
Beban Persediaan	34.951.952,	29.374.472,	5.577.480,	18,988
Beban Barang dan Jasa	23.250.000,	30.266.000,	(7.016.000,)	(23,181)
Beban Pemeliharaan	0,	1.397.000,	(1.397.000,)	(100,)
Beban Perjalanan Dinas	19.750.000,	15.590.000,	4.160.000,	26,684
JUMLAH BEBAN	77.951.952,	76.627.472,	1.324.480,	1,728
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(52.309.952,)	(51.327.972,)	(981.980,)	1,913
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,	0,	0,	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,	0,	0,	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(52.309.952,)	(51.327.972,)	(981.980,)	1,913
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	
Beban Luar Biasa	0,	0,	0,	
POS LUAR BIASA	0,	0,	0,	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(52.309.952,)	(51.327.972,)	(981.980,)	1,913

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**KANTOR PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2024**

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0,	(2.045.000,)	2.045.000,	(100,)
SURPLUS/DEKURIT-LO	(52.309.952,)	(51.327.972,)	(981.980,)	1,91
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	52.309.952,	53.372.972,	(1.063.020,)	(1,99)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0,	2.045.000,	(2.045.000,)	(100,)
EKUITAS AKHIR	0,	0,	0,	0,

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Negeri Sibolga

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Visi Pengadilan Negeri Sibolga adalah bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sibolga mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Sibolga.

Visi Pengadilan Negeri Sibolga adalah **“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA YANG AGUNG”**, yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Sibolga menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Sibolga adalah

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sibolga.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sibolga.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sibolga.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sibolga melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan.
2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan dihormati.
3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat pencari keadilan.
4. Mewujudkan profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Sibolga.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Negeri Sibolga menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Negeri Sibolga dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Negeri Sibolga. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sibolga adalah sebagai berikut

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-
LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga	100%

	tidak dilakukan pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua lima juta

rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap

dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

AsetLainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran

yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Sibolga telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi dan adanya perubahan rencana penarikan pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
1	2	3
PENDAPATAN	0	0
PENDAPATAN PNBP	38.426.000	38.426.000
JUMLAH PENDAPATAN	38.426.000	38.426.000
Belanja		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang	206.180.000	206.180.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	206.180.000	206.180.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 25.642.000,- atau mencapai 67 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.38.426.000,-. Rincian pendapatan Pengadilan Negeri Sibolga dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	30 Juni 2024		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Anggaran
1	2	3	4
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	30.000	0	
Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	3.320.000	500.000	
Pendapatan Ongkos Perkara	12.410.000	8.065.000	
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	22.666.000	17.077.000	
Jumlah	38.426.000	25.642.000	

B.2 Belanja

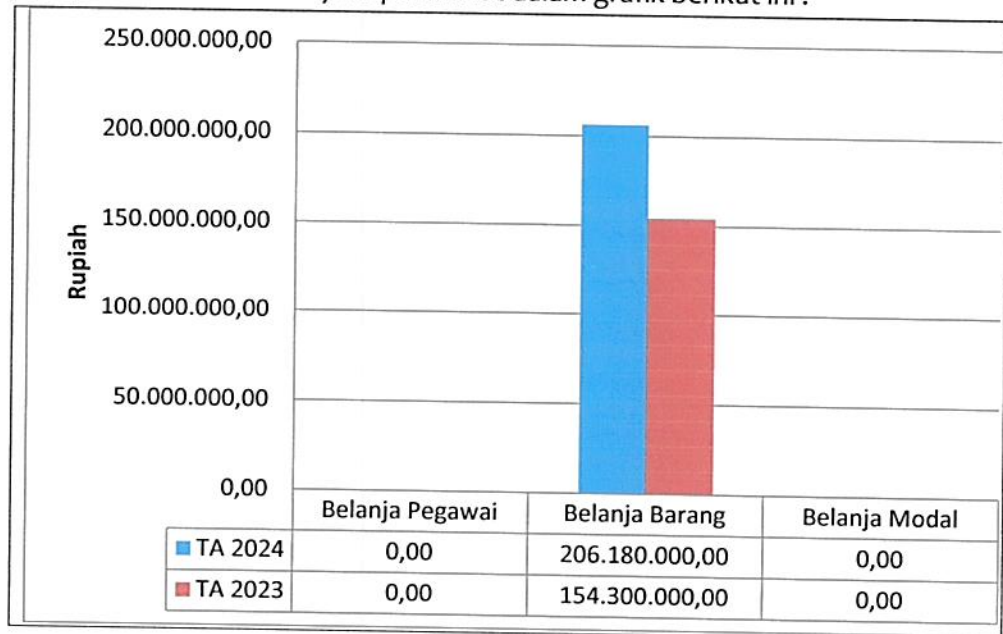
Realisasi Belanja
Negara Rp.
206.180.000,-

Realisasi Belanja instansi pada periode yang berakhir 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 73.133.000,- atau 35% dari anggaran belanja sebesar Rp. 206.180.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja periode yang berakhir 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode yang berakhir 30 Juni 2024

URAIAN	TA periode yang berakhir 30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Anggaran
1	2	3	4
Belanja Pegawai	0	0	%
Belanja Barang	206.180.000	73.133.000	35%
Belanja Modal	0	0	0,00%
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00%
Total Belanja Kotor	206.180.000	73.133.000	35%
Pengembalian	0	0	0,00%
Jumlah	206.180.000	73.133.000	35%

Komposisi realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp.
0,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2023 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023

Uraian	TA 2024 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2024	TA 2023 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023
Belanja Gaji dan Tunj.PNS	0	0
Belanja Uang Makan	0	0
Belanja Uang Lembur	0	0
Total Belanja Kotor	0	0
Pengembalian	0	0
Jumlah	0	0

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp.
149.785.000,-

Realisasi Belanja Barang TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 73.133.000,- dan Rp. 73.822.500,-.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2024 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2022

Uraian	TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024	TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022
Belanja Barang Operasional	0	12.541.000
Belanja Barang Non Operasional	8.250.000	6.770.000
Belanja Jasa	15.000.000	13.000.000
Belanja Pemeliharaan	0	0

Belanja Perjalanan Dinas	19.750.000	15.590.000
Belanja Persediaan	30.133.000	25.921.500
Total Belanja Kotor	73.133.000	179.713.000
Pengembalian Belanja	0	0
Jumlah	73.133.000	73.822.500

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp. 0,-

Realisasi Belanja Modal TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2023 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023

Uraian	TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024	TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023
Belanja Modal Tanah	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-
Belanja jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0
Pengembalian Belanja	-	-
Jumlah Belanja	0	0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Hal ini Belanja Modal Tanah tidak ada di anggarkan.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2023 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023

Uraian Jenis Belanja	TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024	TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023
Belanja Modal Tanah	-	-

Belanja Modal Pembebasan Tanah	-	-
B.Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-
Belanja Modal Pembuatan Serifikat Tanah	-	-
Belanja Modal Pengukuran Tanah	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-
Pengembalian Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2023 Periode Yang Berakhir 30 Juni 2023

Uraian Jenis Belanja	TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024	TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023
Pengadaan Komputer unit/Laptop	0	0
Peralatan Komputer	0	0
Pengadaan meubilier	0	0
Biaya Honor Tim Pengadaan	0	-
	-	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	0	0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 tidak ada di anggarkan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2023 untuk periode
yang berakhir 30 Juni 2023*

Uraian Jenis Belanja	TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024	TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023
Gedung Tempat kerja	-	-
	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-
Pengembalian Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	-	-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp. 0,-.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023

Uraian Jenis Belanja	TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024	TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023
Belanja Modal Jaringan	-	-
B.Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	0	0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2024 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan TA 2023 untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 Nihil. Hal ini disebabkan karena tidak ada di anggarkan di TA 2024 dan TA 2023

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp. 10.000.000,-

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Periode per 30 Juni 2024 Rp. 10.000.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Keterangan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Uang Tunai	10.000.000	0
Kwitansi UP	0	0
Bank BRI Cab.Sibolga	0	0
Jumlah Belanja	0	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp. 0,-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Periode 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.0,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Keterangan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Uang Tunai	-	-
Bank BRI Cabang Pembantu Sibolga	-	-
Jumlah Belanja	-	-

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan Periode Semester I per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara

Piutang Perpajakan
Rp0,-

Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Keterangan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Kas Lain d Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lain d Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Piutang PNB

Piutang PNB
Rp0,-

Saldo Piutang PNB Periode Tri Semester III per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0,-. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Keterangan	Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

No	Nama	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA
Rp0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 dan masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA per tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

No	Nama	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
Rp0,-

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah			
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah			
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	-	-

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar di Muka Rp0,-

Saldo Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

No	Nama	30 Juni 2024	30 Juni 2023
1	Belanja Gaji Pokok PNS	-	-
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-
3	Belanja Tunj.Suami/Isteri PNS	-	-
4	Belanja Tunj.Anak PNS	-	-
	Jumlah	-	-

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0,-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni
2024 dan 30 Juni 2023*

No	Jenis	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

Tagihan TP/TGR
Rp0,-

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

No	Debitur	30 Juni 2024	30 Juni 2023
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

Tagihan Penjualan
 Angsuran
 Rp0,-

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024

No	Debitur	30 Juni 2024	30 Juni 2024
	Nihil	-	-
		-	-
		-	-
	Jumlah	-	-

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang
 Tak Tertagih –
 Piutang Jangka
 Panjang
 Rp0,-

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
 Per 30 Juni 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak tertagih	-	-	-

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Negeri Sibolga per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Tidak ada mengalami Mutasi Tambah ataupun Kurang. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tanah
Rp. 0,-

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2024	0
Mutasi Tambah	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	0
Penyitaan Pengadilan	-
Saldo per 30 Juni 2024	0

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin
Rp. 0,-

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	1.494.941.423
Mutasi Tambah	-
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
Hibah Barang	-
Penggunaan Kembali	-
Mutasi Kurang	-
Penghentian dari Pengguna	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp. 0,- dan Rp. 0,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Gedung dan
Bangunan
Rp.0,-

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2022	4.899.492.000
Mutasi Tambah	-
Pembelian/Pembangunan	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan	-

Nilai Buku per 30 Juni 2024	-
-----------------------------	---

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp.0,-

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	99.385.000
Mutasi Tambah	0
Penambahan Jaringan Listrik	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	0

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp. 0,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.0,- dan Rp. 0,-. Aset tetap tersebut berupa Bahan Perpustakaan Tercetak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	10.474.751
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	0

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-, untuk per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 ini tidak ada pengerjaan Pembangunan Gedung Kantor.

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember TA 2021

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan,Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
0	Jumlah	0	0	0

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Negeri tebing Tinggi berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	-
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan	-

Nilai Buku per 30 Juni 2024	-
-----------------------------	---

C.21 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp. 0,-

Saldo Aset Lain-lain) per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp.0,- dan Rp.0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des 2022	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	0

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.0,-

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Aset Tak Berwujud	-	-	-
	Jumlah	-	-	-
	Aset Lain-lain	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN

Rp. 10.000.000,-

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak
Ketiga

Rp. 226.967.333,-

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp. 226.967.333,- dan Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.25 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima
di Muka

Rp0,-

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Sampai pelaporan ini dibuat Pendapatan Diterima Dimuka Nilainya Nihil.

Rincian Pendapatan diterima dimuka

Uraian	Jumlah
Nihil	-
	-
	-
Total	-

Beban Yang Masih
Harus Dibayar Rp0,-

C.26 Beban Yang Masih Harus Dibayar

Beban Yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	31 Desember 2021	31 Des 2020
Nihil	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.27 Ekuitas

Ekuitas
Rp.0,-

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 25.642.000,- dan Rp 25.299.500,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

Uraian	30 Juni 2024
1	2
Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	500.000
Pendapatan Ongkos Perkara	8.065.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	17.077.000
umlah	25.642.000

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp. 0

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai pada 30 Juni 2024

NO.	URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2024
1	Beban Gaji dan Tunj.PNS	0
2	Beban Uang Makan PNS	0
3	Beban Lembur	0
4	Beban Tunj.Khusus & Beban Pegawai Transito	0
Jumlah		0

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp
34.951.952,-

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 34.951.952,- dan Rp. 29.374.472,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2021 dan 30 Juni adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

NO.	URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2024	30 Juni 2023	Naik (Turun)%
1	Beban Persediaan Konsumsi	34.951.952	29.374.472	18,9%
2	Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
3	Beban Persediaan pita,cukai,materai dan Leges	-	-	-
4	Beban Persediaan Barang Hasil Sitaan	-	-	-
5	Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah		48.070.472	58.600.162	18,9%

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa Rp. 23.250.000,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 23.250.000,- dan Rp. 30.266.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp. 0,-

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 1.397.000,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas Rp. 19.750.000
,-

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 19.750.000,- dan Rp. 15.590.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial
Rp0,-

Beban Bantuan Sosial per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp 0,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

D.11 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp.0,-

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2024

NO.	URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun)%
1	Penerimaan kembali Belanja Pegawai	0	0	00.00
2	Penjualan Alat Kantor	0	0	00.00
3	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	00.00
4	Pendapatan dari kegiatan non operasional	0	0	00.00
5	Beban dari kegiatan non operasional	0	0	00.00
Jumlah		0	0	00.00

*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp. 0,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan (Rp. 2.045.000,-)

Defisit LO

Rp. (52.309.352,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. (52.309.952,-) dan Rp. (51.327.972,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan

Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Selisih Revaluasi Aset

Tetap Rp0,-

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp 0,-.

Koreksi Aset Tetap Non

Revaluasi Rp0,-

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain Rp 0,-

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp 0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp. 52.309.952,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 52.309.952,- dan Rp. 53.372.972,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 1 Januari 2024 hingga 30 Juni 2024 DDEL sebesar Rp (25.642.000) sedangkan 30 juni 2024 DKEL sebesar Rp. 73.133.000,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 30 Juni 2024 Rp. 0,- terdiri dari:

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	0	0
2	Persediaan	0	0

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan

pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima per 30 Juni 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah Rp. 0,-.

Ekuitas Akhir Rp. 0,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan (Rp. 2.045.000,-)

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada tanggal berakhirnya 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 sampai Pelaporan Calk terdapat Kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca. Yakni :

F.2 Temuan dan Tindak Lanjut BPK

Tidak terdapat temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK untuk laporan keuangan yang berakhir 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 .

F.3 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional lingkup Pengadilan Negeri Sibolga sampai dengan Tahun 2021 Audited sebanyak 3 rekening dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekening Bendahara Pengeluaran.

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nilai
1	BPG 106 PN SIBOLGA BADAN URUSAN ADM	653250987391000	0
2	BPG 106 PN SIBOLGA BADAN PERADILAN UMUM	654440992031000	9.998.000

2. Rekening Pemerintah Lainnya.

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nilai
1	RPL 106 PN SIBOLGA UTK PDT	00383-01-30-000052-8	226.967.333,00

F.4 Program Prioritas Nasional

Pelaksanaannya diantaranya melalui layanan bantuan hukum yang masuk pada program prioritas nasional VII (memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik) dengan pagu Rp.36.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- 41 % dengan rincian sebagai berikut.

Nama satker	Progra	Pagu	realisasi	%	Satuan rincian output	target	Capout	%
PN.Sibolga	Layanan bantuan hukum	Rp.36.000.000,-	Rp.15.000.000	41.67	Rp.3.000.000/Bln	100%	100%	100%

F.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

a. REVISI DIPA

Hingga Berakhirnya periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 hal Revisi Dipa 01 Pengadilan Negeri Sibolga melaksanakan sebanyak 3 kali revisi baik revisi halaman 3 DIPA .

b. RALAT SPM,SSBP dan SSPB

Sampai berakhirnya periode 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 tidak terdapat ralat SPM .

LAMPIRAN

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN DAN REKENING PEMERINTAH LAINNYA:

NO	NO REKENING	Kategori
1.	653250987391000 BPG 106 PN SIBOLGA BADAN URUSAN ADM (BRI Cab.Sibolga)	Bendahara Pengeluaran
2.	654440992031000 BPG 106 PN SIBOLGA BADAN PERADILAN UMUM (BRI Cab.Sibolga)	Bendahara Pengeluaran
3.	00383-01-30-000052-8 RPL 106 PN SIBOLGA UTK PDT (BTN Kantor Cabang Pembantu Sibolga)	Rekening Pemerintah Lainnya

LAPORAN KINERJA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2024

PERIODE 30 JUNI 2024

KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
SATUAN KERJA

: (005) MAHKAMAH AGUNG
: (03) DITJEN BADAN PERADILAN UMUM
: (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

KODE	KEGIATAN	BELANJA			KELUARAN				KETERANGAN
		ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	SATUAN	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1049	PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM								
1049.AEA	KORDINASI								
6986.EBA.001	PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA								
52	BELANJA BARANG	1,500,000	750,000	50	2	1	KEGIATAN	50	
1049.BCA	PERKARA HUKUM PERSEORANGAN								
1049.BCA.U03	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DI WILAYAH BARAT								
52	BELANJA BARANG	166,670,000	57,383,00	34,429	400	185	PERKARA	33,39	
1049.QBA	LAYANAN BANTUAN HUKUM PERSEORANGAN								
1049.QBA.032	LAYANAN POS BAKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM	36,000,000	15,000,000	41,667	169	75	ORANG	41,65	
SUBTOTAL		206,180,000	73,133,000	35,47					
PENYESUAIAN (REVISI DIPA/PENGEMB ALIAN BELANJA/DLL									
TOTAL		206,180,000	73,133,000	35,47					

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2024
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/24 12:25 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:32 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	25,642,000	25,299,500	342,500	1.354
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	25,642,000	25,299,500	342,500	1.354
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	25,642,000	25,299,500	342,500	1.354
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	34,951,952	29,374,472	5,577,480	18.988
Beban Barang dan Jasa	23,250,000	30,266,000	(7,016,000)	(23.181)
Beban Pemeliharaan	0	1,397,000	(1,397,000)	(100)
Beban Perjalanan Dinas	19,750,000	15,590,000	4,160,000	26.684
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/24 12:25 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:32 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	77,951,952	76,627,472	1,324,480	1.728
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(52,309,952)	(51,327,972)	(981,980)	1.913
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(52,309,952)	(51,327,972)	(981,980)	1.913
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(52,309,952)	(51,327,972)	(981,980)	1.913

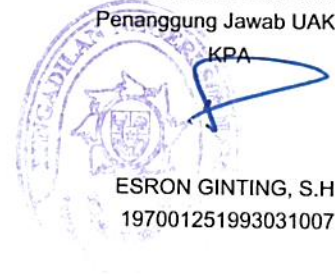
Keterangan :

FINAL

SIBOLGA, 24 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



ESRON GINTING, S.H.

197001251993031007

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:33 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	(2,045,000)	2,045,000	(100)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(52,309,952)	(51,327,972)	(981,980)	1.91
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	52,309,952	53,372,972	(1,063,020)	(1.99)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	2,045,000	(2,045,000)	(100)
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

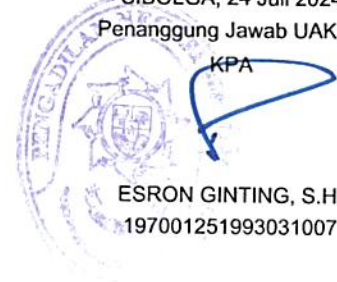
Keterangan :

FINAL

SIBOLGA, 24 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



ESRON GINTING, S.H.

197001251993031007

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIBOLGA 099203

Tgl Data : 24/07/24 12:25 AM
Tgl Cetak : 24/07/24 7:33 AM
Halaman : 1
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024			2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN
1	2	4	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	38,426,000	25,642,000	67	37,240,000	25,299,500	11,940,500
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	38,426,000	25,642,000	67	37,240,000	25,299,500	11,940,500
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	38,426,000	25,642,000	67	37,240,000	25,299,500	11,940,500
B. Belanja Negara	206,180,000	73,133,000	35	154,300,000	73,822,500	80,477,500
I. Belanja Pemerintah Pusat	206,180,000	73,133,000	35	154,300,000	73,822,500	80,477,500
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	0	0	0	0	0	0
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
 ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SIBOLGA 099203

Tgl Data : 24/07/24 12:25 AM
 Tgl Cetak : 24/07/24 7:33 AM
 Halaman : 2
 lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	206,180,000	73,133,000	(133,047,000)	35	154,300,000	73,822,500	80,477,500	48
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

SIBOLGA, 24 Juli 2024
 Penanggung Jawab UAKPA
 KPA



ESRON GINTING, S.H.
 197001251993031007

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 24/07/24 7:34 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0	10,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	226,967,333	0	226,967,333	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	236,967,333	0	236,967,333	
JUMLAH ASET	236,967,333	0	236,967,333	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	226,967,333	0	226,967,333	0.00
Uang Muka dari KPPN	10,000,000	0	10,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	236,967,333	0	236,967,333	
JUMLAH KEWAJIBAN	236,967,333	0	236,967,333	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	236,967,333	0	236,967,333	

Keterangan :
FINAL

SIBOLGA, 24 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

ESRON GINTING, S.H.
197001251993031007

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/24 12:25 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:34 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	226,967,333	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	226,967,333
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	10,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	73,133,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	25,642,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	4,818,952
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	500,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	8,065,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	17,077,000
3.0	521211	Beban Bahan	8,250,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	15,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,750,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	34,951,952	0
JUMLAH			340,561,285	340,561,285

Keterangan :

FINAL

SIBOLGA, 24 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



ESRON GINTING, S.H.

197001251993031007

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (099203) PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Tgl Data : 24/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 24/07/24 7:35 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	73,133,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	25,642,000	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	500,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	8,065,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	17,077,000
3.0	521211	Belanja Bahan	8,250,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,133,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	15,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,750,000	0
JUMLAH			98,775,000	98,775,000

Keterangan :

FINAL

SIBOLGA, 24 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



ESRON GINTING, S.H.

197001251993031007

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 03
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 099203
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
SUMATERA UTARA
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 24/07/24 7:36 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01 1049 AEA 52 5241 524113	RUPIAH MURNI Peningkatan Manajemen Peradilan Umum null BELANJA BARANG Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000	1.500,000 1.500,000 1.500,000 1.500,000	750,000 750,000 750,000 750,000	0 0 0 0	750,000 750,000 750,000 750,000	50 50 50 50	750,000 750,000 750,000 750,000
BCA 52 5211 521114	Perkara Hukum Perseorangan BELANJA BARANG Belanja Barang Operasional Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22,570,000 22,570,000	22,570,000 22,570,000	0 0	0 0	0 0	0 0	22,570,000 22,570,000
5212 521211	Belanja Barang Non Operasional Belanja Bahan	41,000,000 41,000,000	41,000,000 41,000,000	8,250,000 8,250,000	0 0	8,250,000 8,250,000	20.12 20.12	32,750,000 32,750,000
5218 521811	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212 Belanja Barang Persediaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	40,000,000 40,000,000	40,000,000 40,000,000	30,133,000 30,133,000	0 0	30,133,000 30,133,000	75.33 75.33	9,867,000 9,867,000
5241 524113	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	63,100,000 63,100,000	63,100,000 63,100,000	19,000,000 19,000,000	0 0	19,000,000 19,000,000	30.11 30.11	44,100,000 44,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	166,670,000	166,670,000	57,383,000	0	57,383,000	34.43	109,287,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.BCA	166,670,000	166,670,000	57,383,000	0	57,383,000	34.429	109,287,000
QBA 52 5221 522131	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan BELANJA BARANG Belanja Jasa Belanja Jasa Konsultan	36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000	36,000,000 36,000,000 36,000,000 36,000,000	15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000	0 0 0 0	15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000	41.67 41.67 41.67 41.667	21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	36,000,000	36,000,000	15,000,000	0	15,000,000	41.67	21,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	36,000,000	36,000,000	15,000,000	0	15,000,000	41.67	21,000,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.QBA	36,000,000	36,000,000	15,000,000	0	15,000,000	41.667	21,000,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
 ESELON I : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : null SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : 099203 PENGADILAN NEGERI SIBOLGA
 JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.1
 Tanggal : 24/07/24 7:36 AM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_sgo_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
QCA	null							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
521211	Belanja Bahan	60,000	60,000	0	0	0	0	60,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212							
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,010,000	2,010,000	0	0	0	0	2,010,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1049.QCA	2,010,000	2,010,000	0	0	0	0	2,010,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN1049	206,180,000	206,180,000	73,133,000	0	73,133,000	35.47	133,047,000
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	206,180,000	206,180,000	73,133,000	0	73,133,000	35.47	133,047,000
	JUMLAH BELANJA	206,180,000	206,180,000	73,133,000	0	73,133,000	35.47	133,047,000

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
Telepon: 021-5758965, 45, 64, 48 Fax. 021-5700914



INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MAHKAMAH AGUNG (005)
DITJEN BADAN PERADILAN UMUM (03)
PENGADILAN NEGERI SIBOLGA (099203)
Rekening Induk : RKK DITJEN BADILUM O (023001xxxxxx304)
Virtual Account : 654440992031000 | BPG 106 PN SIBOLGA BADAN PERADILAN UMUM
Periode : 01-06-2024 s/d 30-06-2024

TanggalTransaksi	JamTransaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-06-14	12:03:13	31781901	Penggunaan Uang Persediaan Untuk Kepeluan Belanja Barang. 241061301001925000001	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	SPAN	
2024-06-21	11:03:26	31697282	REGULAR_65444_0992031000	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	TELLER_CARD	
2024-06-28	12:01:45	32082540	Penggunaan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang. 241061301002073000001	0,00	0,00	9.998.000,00	9.998.000,00	SPAN	
Total Mutasi				10.000.000,00	19.998.000,00				
Saldo Akhir							9.998.000,00		

LAPORAN TRANSAKSI



DATE PRINTED : 01/07/24 09:01:40
SIBOLGA Branch : 00383

NO. : 383-01-30-000052-8
REKENING : 383-01-30-000052-8

Last Stmt : 01/07/2024
Last Bal 226,967,333.00

Period: 01/06/2024 - 30/06/2024 DDI230P Page 1
Kepada Yth,
RPL 106 PN SIBOLGA UTK PDT
JALAN PADANGSIDIMPUAN NOMOR 6
SARUDIK
SARUDIK
TAPANULI TENGAH

TRANS DATE	EFF. DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
03/06/2024	03/06/2024	98899787524060001 OFTRI YANNTI SIMAMORA	B/F				249,294,333.00 Cr
			3684/001		0	26,500.00	249,320,833.00 Cr
			3249/001		0	15,000.00	249,335,833.00 Cr
			0590/001		0	100,000.00	249,435,833.00 Cr
			0000/001		0	1,250,000.00	250,685,833.00 Cr
			3189/001		0	1,155,000.00	251,840,833.00 Cr
			2938/001		0	16,500.00	251,857,333.00 Cr
			0000/001		0	785,000.00	252,642,333.00 Cr
			9278/001		0	17,500.00	252,659,833.00 Cr
			5477/001		0	100,000.00	252,759,833.00 Cr
			0000/001		0	14,500.00	252,774,333.00 Cr
			0000/001		0	1,705,000.00	254,479,333.00 Cr
			3713/001		0	645,000.00	255,124,333.00 Cr
			0000/002		20,000,000.00	0	235,124,333.00 Cr
			2369/001		0	33,500.00	235,157,833.00 Cr
			3691/001		0	33,500.00	235,191,333.00 Cr
			0430/001		0	17,000.00	235,208,333.00 Cr
			9140/001		0	645,000.00	235,853,333.00 Cr
			0997/001		0	14,500.00	235,867,833.00 Cr
			0400/001		0	100,000.00	235,967,833.00 Cr
			0000/001		0	645,000.00	236,612,833.00 Cr
			1864/001		0	16,000.00	236,628,833.00 Cr
			5806/001		0	100,000.00	236,728,833.00 Cr
			3771/001		0	15,000.00	236,743,833.00 Cr
					0	17,000.00	236,760,833.00 Cr

06/06/2024	98899787524060026	Manghnut Tua Rangkuti	1907/001			0	100,000.00		236,860,833.00	Cr
06/06/2024	0098899787524060027	MULIANI WARUWU	9688/001			0	15,500.00		236,876,333.00	Cr
06/06/2024	98899787524060024	RUDY 8899 000	0000/001			0	785,000.00		237,661,333.00	Cr
06/06/2024	0098899787524060030	CHISKA LIMBONG	1047/001			0	17,000.00		237,678,333.00	Cr
06/06/2024	98899787524060028	RUDY 8899 000	0000/001			0	785,000.00		238,463,333.00	Cr
06/06/2024	0098899787524060029	MISWANITO	2511/001			0	100,000.00		238,563,333.00	Cr
07/06/2024	0098899787524060031	MARTIANI SIMBOLON	9389/001			0	14,500.00		238,577,833.00	Cr
10/06/2024	98899787524060032	JONAS BERNARD 8899 000	0000/001			0	15,500.00		238,593,333.00	Cr
10/06/2024	98899787524060034	Dev Anggraini Sihaaan	2468/001			0	58,500.00		238,651,833.00	Cr
10/06/2024	Pembayaran Kasasi perkara No 105		6723/001			0	3,000,000.00		241,651,833.00	Cr
10/06/2024	Bayar kasasi perkara No 119		7486/001			0	3,000,000.00		244,651,833.00	Cr
11/06/2024	98899787524060035	Dewi Marmauli 8899 000	0000/001			0	58,500.00		244,710,333.00	Cr
11/06/2024	0098899787524060036	SIHARTONO SITUMEANG	4779/001			0	15,000.00		244,725,333.00	Cr
11/06/2024	0098899787524060037	LAMBOK PARDIMUAN SIN	9753/001			0	15,500.00		244,740,833.00	Cr
11/06/2024	0098899787524060038	BERNARD FR TARIHORAN	3237/001			0	100,000.00		244,840,833.00	Cr
11/06/2024	98899787524060039	HARUJUNA NAINGGOLAN	4063/001			0	13,500.00		244,854,333.00	Cr
11/06/2024	98899787524060040	AGUAN PARHUSIP	5687/001			0	15,000.00		244,869,333.00	Cr
11/06/2024	98899787524060041	LIA OKTAVIA SIHOMBING	5288/001			0	20,000.00		244,889,333.00	Cr
12/06/2024	0098899787524060042	EKA SURYANI SITUMEAN	3887/001			0	17,500.00		244,906,833.00	Cr
13/06/2024	0098899787524060043	Manghnut Tua Rangkuti	6323/001			0	2,175,000.00		247,081,833.00	Cr
13/06/2024	0098899787524060044	FUAD LUBIS	7817/001			0	13,500.00		247,095,333.00	Cr
13/06/2024	PK CK TQ 214468 AN PN SIBOLGA		0000/002		20,000,000.00	0	0		227,095,333.00	Cr
13/06/2024	0098899787524060045	SAHATA NAINGGOLAN	4242/001			0	20,000.00		227,115,333.00	Cr
14/06/2024	98899787524060046	Manghnut Tua Rangkuti	9398/001			0	37,500.00		227,152,833.00	Cr
14/06/2024	98899787524060047	Manghnut Tua Rangkuti	4893/001			0	13,500.00		227,166,333.00	Cr
14/06/2024	98899787524060049	Manghnut Tua Rangkuti	5706/001			0	1,695,000.00		228,861,333.00	Cr
14/06/2024	98899787524060051	HERLINAWATI	8658/001			0	14,500.00		228,875,833.00	Cr
19/06/2024	98899787524060050	ELVIN TANI GEA	8788/001			0	20,500.00		228,896,333.00	Cr
19/06/2024	98899787524060052	SAANTI NASUTION	8435/001			0	100,000.00		228,996,333.00	Cr
19/06/2024	0098899787524060053	REPANSYAH RENATUS PA	6452/001			0	100,000.00		229,096,333.00	Cr
20/06/2024	0098899787524060054	LISNA PASARIBU	4877/001			0	100,000.00		229,196,333.00	Cr
20/06/2024	98899787524060055	RUDY 8899 000	0000/001			0	785,000.00		229,981,333.00	Cr
20/06/2024	0098899787524060056	ALFREDIOLA PURBA	2573/001			0	100,000.00		230,081,333.00	Cr
20/06/2024	0098899787524060057	RINA PURNAMA WATI LUM	5872/001			0	100,000.00		230,181,333.00	Cr
21/06/2024	98899787524060058	Manghnut Tua Rangkuti	4382/001			0	100,000.00		230,281,333.00	Cr
24/06/2024	0098899787524060059	LAMSHAR KRIS TINA SR	9735/001			0	100,000.00		230,381,333.00	Cr
24/06/2024	98899787524060060	SITI CHAIRANI	2416/001			0	100,000.00		230,481,333.00	Cr
25/06/2024	0098899787524060061	HOTDO BOY SIMBOLON	3391/001			0	100,000.00		230,581,333.00	Cr
25/06/2024	98899787524060062	ELVIN TANI GEA	8514/001			0	17,500.00		230,598,833.00	Cr
25/06/2024	0098899787524060063	MERIANI STOHHANG	6978/001			0	100,000.00		230,698,833.00	Cr
25/06/2024	0098899787524060064	BERNARD FR TARIHORAN	3730/001			0	14,500.00		230,713,333.00	Cr
25/06/2024	0098899787524060066	ARTA DEWI OKTAVIANA	0376/001			0	19,500.00		230,732,833.00	Cr

LAPORAN BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

PERIODE 1 JANUARI 2024 s/d 30 JUNI 2024

K/L : (005) Mahkamah Agung
 Provinsi : (0700) Sumatera Utara
 Satua Kerja : Pengadilan Negeri Sibolga

Periode	Uraian	Kedadaan Keuangan					
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Saldo Akhir di Di Bank	Saldo Akhir di Brangkas
Januari s/d Juni 2024	Biaya Perkara	94.453.850	189.064.210	177.561.000	105.957.060	0	105.957.060
	Biaya Eksekusi	136.286.500	1.350.598.000	1.350.360.500	136.524.500	0	136.524.500
	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	230.740.350	1.539.662.210	1.527.921.500	242.481.560		242.481.560

Sibolga, 24 Juli 2024
 Panitia

 Temaziduhu Harefa, S.H.

